

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penulisan sejarah Indonesia telah menjadi polemik di penghujung abad ke-XX seiring bergulirnya reformasi yang memberi peluang seluas-luasnya untuk mengemukakan pendapat secara terbuka. Keterbukaan ini juga merambah di kalangan akademikus dan ilmuwan, sehingga acap kita dengar dan baca pernyataan-pernyataan yang cenderung berseberangan dengan pandangan umum.

Pandangan umum yang mengemuka bahwa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto merupakan pemerintahan yang demokratis dengan indikator yang jelas dengan adanya pemilihan umum yang dapat diselenggarakan sebanyak enam kali dari 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang diikuti oleh partai-partai politik dan golongan yang merupakan ciri dari penyelenggaraan negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi secara teoritis bahwa rakyat mempunyai hak untuk bersuara karena pada hakikatnya demokrasi itu adalah perwujudan pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat secara langsung bahwa rakyat dapat menentukan pilihan pemimpin yang sesuai keinginannya, sedangkan yang tidak langsung, pemilihan pemimpin diserahkan kepada lembaga yang sudah ditentukan sebagai institusi perwakilan Indonesia disebut MPR/DPR.

Selama pemerintahan Orde Baru mekanisme pemerintahan itu berjalan dengan harmonis.

Perubahan politik di Indonesia pada 1998 memberi peluang untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru ditandai sebagai pemerintahan yang demokratis yakni, penerapan prinsip penyelenggaraan Pancasila secara murni dan

konsekuen. Oleh karena itu, tafsir ulang penyelenggaraan pemerintahan merupakan keharusan sejarah jadi muncullah berbagai pemikiran dan evaluasi tentang kepemimpinan Orde Baru. Evaluasi ini dapat kita lihat dari dua prespektif berbeda yang memandang bahwa kepemimpinan Orde Baru sesuai dengan azas pemerintahan yang didukung oleh Undang-Undang, sedangkan yang kedua melahirkan pemikiran yang menganggap pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang diselenggarakan secara represif dan teror.

Pemikiran yang pertama tentang penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru merupakan keniscayaan sehingga tidak perlu dievaluasi dengan memakai sudut pandang ideologi Pancasila, sedangkan pemikiran yang kedua membuka peluang untuk terselenggaranya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan karena didukung oleh ideologi yang sedang berkembang dan menjadi trend di dunia yakni liberalisme atau hak kebebasan untuk berpendapat. Beberapa tokoh intelektual akademik pada era setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru menunjukkan eksistensinya pada era Reformasi. Pada era ini kebebasan mengemukakan pendapat menjadikan mereka secara terbuka dan bebas menyuarakan hasil pemikirannya. Pada era Reformasi ini, hasil pemikiran dan penilaian terhadap pemerintahan Orde Baru terorientasi pada kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru yang belum tertulis di buku sejarah. Pandangan ini dapat dilihat dari pemikiran salah satu tokoh intelektual akademik seperti Asvi Warman Adam, yang secara terbuka mengkritik pemerintahan Orde Baru. Asvi Warman Adam telah banyak melakukan dekonstruksi terhadap penulisan sejarah Orde Baru yang menurutnya telah melakukan kebohongan sejarah selama kepemimpinan Soeharto di era Orde Baru.

Soeharto yang dikenal semasa pemerintahan Orde Baru sebagai Bapak Pembangunan, selama pemerintahannya telah melakukan beberapa kebijakan-kebijakan seperti, pembangunan berjangka dalam bidang infrastruktur dan suprastruktur, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan mutu pendidikan wajib belajar, memerangi angka buta huruf, program KB (Keluarga Berencana), swadaya pangan, cinta produk dalam negeri, dan membangkitkan rasa nasionalisme melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan menjalankan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) ke seluruh elemen masyarakat, baik di tingkat SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan bahkan masuk sampai ke wilayah kerja. Penataran P4 dilakukan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila. Jalan ini yang ditempuh pemerintahan Orde Baru untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila secara murni. Pencapaian Demokrasi Pancasila ini juga didasari oleh trauma sejak terjadinya peristiwa 1965 yang mengancam Indonesia dari serangan komunis.

Melalui Demokrasi Pancasila ini, pemerintahan Orde Baru secara tegas membendung paham komunis yang bertengger di Indonesia, salah satunya dengan membersihkan aparatur negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI, membubarkan PKI sebagai organisasi dan menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Peredaran PKI ditumpas selama pemerintahan Orde Baru demi menjaga kesakralan Pancasila sebagai dasar negara dan mencegah terulangnya peristiwa September 1965. Semua organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan berasaskan Pancasila. Di dunia pendidikan, baik tawuran, kekerasan diantara siswa, geng

motor, narkoba dan minuman keras tidak pernah terjadi. Demikian halnya di dalam masyarakat, tidak ada kerusuhan antar kelompok preman, tidak ada konflik antar kelompok agama, yang ada keteraturan dan kedamaian.

Kendati demikian, beberapa kebijakan dan keberhasilan selama pemerintahan Orde Baru tersebut tak luput dari representasi negatif oleh Asvi Warman Adam. Dalam tulisannya, Asvi Warman Adam menyebut Penataran P4 dilaksanakan untuk mencuci otak bangsa, dan yang paling fenomenal adalah pandangan Asvi Warman Adam terkait kasus penumpasan PKI selama pemerintahan Orde Baru dan membawa nama Soeharto sebagai orang yang bertanggung jawab terkait penahanan di kamp Pulau Buru yang melibatkan orang-orang yang tertuduh sebagai pelaksana Gerakan 30 September atau PKI. Selain itu, Asvi Warman Adam dalam pandangannya menganggap bahwa selama pemerintahan Orde Baru, Soeharto telah merestui adanya peristiwa pembunuhan misterius (petrus). Dalam pandangannya yang lain, Asvi Warman Adam juga mengaitkan sejarah Timor Timur sebagai suatu persoalan yang selama pemerintahan Orde Baru masih menjadi perdebatan sebagai pendudukan, penjajahan, atau integrasi di Timor Timur. Pandangan Asvi Warman Adam berikutnya terkait dengan peran historis Soeharto yang dibesar-besarkan selama pemerintahan Orde Baru yang digambarkan melalui film ataupun buku.

Dalam kumpulan tulisannya, Asvi Warman Adam lebih menonjolkan kekurangan daripada kelebihan di masa Orde Baru. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk kritik Asvi Warman Adam terhadap kebijakan Presiden Soeharto semasa pemerintahan Orde Baru. Kebijakan yang telah terselenggara selama pemerintahan Orde Baru rupanya menyeret Presiden Soeharto ke dalam jurang

kegelapan sejarah Indonesia, ditambah dengan opini publik saat ini yang mempertanyakan tentang kesahihan Presiden Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru. Bahkan Asvi Warman Adam melalui dekonstruksi sejarah Orde Baru menyebut Soeharto sebagai Bapak Pelanggar Berat HAM. Oleh karena itu, jurang kegelapan sejarah Orde Baru sebagaimana yang ditulis Asvi Warman Adam memberi masukan dan pandangan tersendiri bagi peneliti untuk mengetahui sejauh mana Asvi Warman Adam menilai dan memandang Orde Baru berdasar pada kebijakan Presiden Soeharto sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, penelitian ini terangkum dalam judul penelitian sebagai berikut: **“Pemerintahan Orde Baru Dalam Pandangan Asvi Warman Adam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru.
2. Kontroversi sejarah Orde Baru dalam penulisan sejarah Indonesia.
3. Kritik Asvi Warman Adam terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru.

1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, pembatasan penelitian ini terfokus pada **“Pandangan Asvi Warman Adam dalam mendekonstruksi Penulisan Sejarah Versi Pemerintahan Orde Baru”**.

1.4. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang tersirat dalam judul dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Asvi Warman Adam dalam menilai rekayasa sejarah pemerintahan Orde Baru dalam tulisannya?
2. Mengapa Asvi Warman Adam mendekonstruksi sejarah Orde Baru dari sisi gelap sejarah Indonesia?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Asvi Warman Adam dalam menilai sejarah pemerintahan Orde Baru dalam tulisannya.
2. Untuk mengevaluasi rekayasa sejarah pemerintahan Orde Baru dari hasil tulisan Asvi Warman Adam yang bersifat kontroversial.

1.6. Manfaat Penelitian

Setelah mencapai tujuan diatas, manfaat yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini diantaranya:

1. Sebagai penambah wawasan dan informasi baru bagi peneliti terkait pemikiran Asvi Warman Adam tentang pemerintahan Orde Baru.
2. Sebagai alternatif pembelajaran bagi masyarakat luas, terutama mahasiswa, guru, dan siswa dalam memahami kontroversi sejarah dalam pemerintahan Orde Baru yang ditulis Asvi Warman Adam.